

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena dana pembangunan dari segala aspek tidak dapat lepas dari industri perbankan. Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana. Bagi bank dengan prinsip konvensional (salah satu kegiatannya mengeluarkan kredit), perbedaan antara bunga simpanan yang dibayarkan kepada deposan dan bunga pinjaman menjadi keuntungan utama. Selain itu, sumber dana bank berasal dari dana sendiri, pinjaman, dan pihak ketiga (Ismail, 2018).

Untuk menunjang kegiatan usahanya, bank membutuhkan sumber-sumber pendanaan yang cukup agar dana dapat disalurkan dengan lancar. Selain itu, bisnis bank tidak hanya menitikberatkan pada likuiditas untuk mencari keuntungan, tetapi juga berpedoman pada hukum yang juga menuntut peningkatan taraf hidup masyarakat (Simatupang, 2019). Bank dapat menjalankan kegiatan usahanya melalui bunga pinjaman yang harus dilunasi secara berkala oleh debitur dalam jangka waktu tertentu (Rai & Purnawati, 2017)

Selain itu, alokasi kredit menurut (Mamahit, 2018) merupakan kegiatan yang mengatur bisnis perbankan, karena fungsi bank sebagai perantara dan tugasnya menjadi perantara keuangan.

Ada dua jenis bank di Indonesia, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Menurut (Hermansyah, 2020), bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan konvensional dan atau syariah dalam memberikan jasa dalam usaha pembayaran. Bank umum dapat melakukan fungsi khusus atau lebih memerhatikan kegiatan tertentu, seperti pembiayaan jangka panjang, kegiatan pengembangan koperasi, usaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, serta pengembangan pembangunan perumahan. Cakupan usaha bank umum lebih luas dibandingkan dengan BPR, sebab produk yang disediakan oleh bank umum lebih lengkap.

Peran penting bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana tersebut tidak terlepas dari risiko. Oleh karena itu, mengoptimalkan fasilitas keuangan dianggap sebagai salah satu aktivitas terpenting sistem perbankan. Bank perlu memerhatikan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam penghimpunan dana. Hal ini penting agar bank dapat menjaga kualitas tanpa mengalami kerugian. Sementara, dana pihak ketiga yang tidak stabil juga mengganggu pinjaman kepada nasabah (Mesrawati et al., 2020).

Pada tahun 2017, OJK memiliki ketentuan melalui POJK No.39/POJK.03/2017 mengenai Kepemilikan Tunggal Perbankan di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi (*economic skill*) dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia. Dalam hal ini pula modal minimum bank terbagi menjadi empat yang tingkatan yang menargetkan skala dari setiap bank. Terdapat 2 hingga 3 bank dengan skala internasional yang memiliki modal di atas 50 triliun, 3 hingga 5 bank dengan skala nasional dengan modal 10-50 triliun, 30 hingga 50 bank yang terfokus pada segmen ritel, korporasi, daerah, dan lainnya dengan modal 100 miliar-10 triliun. Sementara, untuk BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas dengan modal di bawah 100 miliar.

Setelah adanya ketentuan tersebut, perbankan di Indonesia tampak menunjukkan pergerakan dengan adanya rencana untuk melakukan konsolidasi. Keadaan ini mulai direalisasi tepatnya pada 2019 pada bank BUSN. Terdapat 11 bank dalam kelompok Bank BUSN yang melakukan merger, termasuk dalam jumlah tersebut bank yang diambilalih maupun bank yang mengambil alih. Hal ini terjadi dengan keinginan bank untuk memperkuat struktur modal, terlebih pada bank BUSN yang terdiri dari kategori BUKU 1 hingga BUKU 4. Dalam kondisi ini, peneliti ingin mengetahui kinerja bank BUSN dilihat dari aktivitas bank dalam menyalurkan kredit, likuiditas yang digambarkan dengan dana pihak

ketiga, kolektibilitas yang digambarkan dengan rasio kredit bermasalah, serta rasio kecukupan modal.

Kondisi likuiditas perbankan tahun 2019 menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) masih terjaga dan memadai. Pada kondisi demikian, penyaluran kredit perbankan tumbuh seiring meningkatnya pertumbuhan dana pihak ketiga. Meski begitu, perlu adanya restrukturisasi yang besar dalam menekan tingkat *non performing loan* dan permodalan bank. Sementara, data menunjukkan bahwa CAR bank umum konvensional meningkat, karena pertumbuhan modal melebihi aktiva tertimbang menurut risiko. Meningkatnya CAR juga digambarkan melalui modal yang dinilai memadai, termasuk di dalamnya terdapat modal inti yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penggunaan dana bank terbesar ada pada aktivitas penyaluran kredit. Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan memang cenderung meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017 kondisi kredit yang tumbuh meningkat disebabkan oleh adanya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dan pengembangan proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Hal ini disebabkan bank juga memiliki andil dalam proyek pembangunan pemerintah sebagai lembaga perantara keuangan. Melihat ke belakang sejak runtuhnya pasar keuangan dan lembaga keuangan, stabilitas keuangan dianggap sangat penting, sebab dampaknya bisa meningkatkan tingkat stres di sektor keuangan (Swamy, 2013).

Jika melihat kembali data yang diperoleh dari (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), sebagian besar DPK masih dikuasai oleh BUSN Devisa. Selain itu, peningkatan laba tertinggi berada pada BUSN Devisa yang tumbuh 39,33% (yoy) menjadi Rp14,1 triliun. Pertumbuhan kredit tahun 2017 disertai oleh meningkatnya kinerja perbankan tercermin dalam kondisi tingkat profitabilitas yang dinilai baik dan diiringi oleh naiknya tingkat efisiensi perbankan. Begitu pun dengan peningkatan aset bank umum yang sejalan dengan naiknya DPK dan tambahan setoran modal oleh pemilik. Bank BUMN memiliki porsi kenaikan aset tertinggi sebesar 40,43%, diikuti oleh BUSN Devisa yang memiliki porsi kenaikan aset tertinggi sebesar 40,13%.

Di lain sisi, perbankan juga berupaya menurunkan kredit macet, di antaranya dengan melakukan penghapusan buku dan lebih meningkatkan proses memantau kredit baru. Seperti tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2018 besarnya dana pihak ketiga juga masih dikuasai oleh kelompok BUSN Devisa. Sedangkan, kinerja BUK tahun 2018 menunjukkan posisi meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan dapat ditopang oleh permodalan yang sangat memadai dan meningkatnya rentabilitas. Pertumbuhan DPK sebesar 7,33% mencerminkan berjalannya fungsi intermediasi bank umum konvensional.

Dari data (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) pada periode ini, dilihat dari kelompok bank, kelompok BUSN Devisa masih menguasai sebagian besar dana pihak ketiga, yakni sebesar 44,29% dan selanjutnya diikuti Bank BUMN sebesar

41,93%. Kondisi yang sama dengan periode sebelumnya terlihat dari nilai rasio kecukupan modal kelompok bank KCBA yang terbilang paling besar dibandingkan dengan kelompok bank lainnya. Pelaporan profil industri perbankan juga menggambarkan bank umum memiliki kondisi perbankan yang relatif baik apabila ditinjau dari sisi pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga tahunan yang tercatat sebesar 8,79%, 8,54%, dan 7,66% (yoy). Kondisi tersebut juga didukung oleh permodalan perbankan yang sejalan dengan meningkatnya rentabilitas dan kualitas kredit perbankan.

Banyak negara yang memiliki unit analisis kredit terpisah dan khusus dengan tujuan meminimalkan risiko melalui manajemen risiko kredit (Aminzadeh & Adibpour, 2016). Dalam hal ini, BPR dinilai masih menanggung peningkatan risiko kredit. Akan tetapi, permodalan cukup kuat menjaga ketahanan BPR dalam menyerap risiko (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Ada beberapa faktor internal yang dapat memengaruhi penyaluran kredit, seperti kecukupan modal, dana yang diterima bank, dan kolektibilitas. Pada penelitian ini dana yang diterima bank dijelaskan melalui dana pihak ketiga, kecukupan modal dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan kolektibilitas bank melalui *Non Performing Loan* (NPL).

Kaitannya dengan tujuan pemakaian dana oleh debitur, kredit disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Besar kecilnya kredit yang disalurkan juga penting memerhatikan kualitas dari kredit

tersebut. Sehingga, risiko kredit seperti *bad loan* dapat dihindarkan (Indriati, 2018). Meningkatnya rasio NPL bisa berdampak pada penurunan penyaluran kredit, karena tidak tercapainya pengembalian dana kepada bank. Bank Indonesia mengenai penetapan peraturan dan pengawasan terhadap perbankan, salah satunya menetapkan NPL secara neto lebih dari 5% dari total kredit. Bank perlu memerhatikan kualitas kredit, karena kredit bermasalah yang dibiarkan berlarut-larut akan memengaruhi kredit yang disalurkan pada periode berikutnya.

Sementara, CAR menunjukkan seberapa besar permodalan bank yang mencukupi kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai harapan kelangsungan usaha bank. Tingginya CAR dapat menggambarkan kestabilan modal. Semakin besar modal yang ada pada suatu bank, akan semakin besar kemampuan bank menyalurkan kreditnya. Semakin besar rasio kecukupan modal, maka akan semakin besar pula ketahanan bank yang bersangkutan dalam berjaga-jaga atas depresiasi aset bank yang timbul karena adanya aset bermasalah. Sehingga, CAR dapat meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menyalurkan kredit (Asmara & ., 2019).

Nilai NPL yang tinggi akan mengakibatkan dana yang disalurkan melalui kredit juga berkurang, sebab bank harus membentuk cadangan yang lebih besar. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merangkum tingkat kualitas kredit menjadi lima kategori, yang mencakup kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang

lancar, diragukan, dan macet. Kredit dikatakan bermasalah (*non performing loan*) apabila kredit yang dibayarkan oleh debitur tersendat-sendat sampai tidak bisa dibayarkan meskipun sudah jatuh tempo. Pada akhirnya, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban minimal pelunasan bahkan dalam kondisi tidak dapat ditagih oleh bank.

Kredit sebagai kegiatan pokok bank memengaruhi pendapatan serta modal yang akan disalurkan kembali. Sehingga, kredit bermasalah yang tinggi akan menyebabkan turunnya pendapatan bank dan bank harus mengeluarkan modal lebih besar untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Penelitian (Fadli, 2019) menyatakan penyaluran kredit dapat ditingkatkan dengan menurunkan NPL, namun penyaluran kredit tidak dipengaruhi oleh CAR. Akan tetapi, (Muammar, 2018) pada penelitiannya menyatakan bahwa NPL tidak memengaruhi kredit yang disalurkan, karena pada tahun 2012-2016 bank mampu mengatasi kredit bermasalah dan mengimbangi keluar masuknya arus modal yang akan disalurkan kembali.

Tingginya rasio CAR akan meningkatkan kepercayaan diri bank dalam menyalurkan kreditnya. Penyaluran kredit yang bernilai tinggi akan meningkatkan potensi risiko kredit yang dihadapi oleh bank, berupa keterlambatan dan tunggakan angsuran pembayaran peminjam yang selanjutnya dapat meningkatkan kredit bermasalah (Anwar & Sunaenah, 2016). Bank menjalani tugasnya dengan mengalihkan dana dari pihak yang memiliki

kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apalagi keberadaan bank pada suatu daerah akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan suatu daerah (Siwi et al., 2019)

Bank diharuskan memiliki jumlah modal minimum untuk menyerap kerugian dan mengurangi masalah *moral hazard* (Crespi & Mascia, 2018). Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang KPPM Bank Umum, BI mewajibkan setiap bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total ATMR (Riswana, Soebroto, & Suriana, 2019). CAR yang tinggi digambarkan oleh Bank Persero, memungkinkan bank tersebut untuk mencover risiko kredit yang diakibatkan oleh kredit bermasalah.

Di samping itu, bank juga bergantung pada dana pihak ketiga yang diandalkan dalam pengoperasian bank. Dana tersebut berasal dari tabungan, deposito, dan giro. Penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memaksimalkan kinerja dan meminimalisasi risiko. Penelitian (Amrozi & Sulistyorini, 2020) menyebutkan bahwa DPK berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank yang terdaftar di Indeks LQ45 tahun 2014-2018. Hasil penelitian (Giri, Purnami, Jayanti, & Amerta, 2019) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit Bank BNI pada periode tahun 2010 sampai dengan triwulan III tahun 2016.

Tidak memerhatikan risiko kredit akan membuat bank kehilangan dana atau pendapatan bunga, sehingga jika berlarut-larut akan menyebabkan kerugian.

Apabila sudah mengalami kerugian dampaknya adalah terhambatnya penyaluran dana kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan (et al. Nurhayati, 2020) menyebutkan bahwa dana pihak ketiga (DPK), *non performing loan* (NPL), dan *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan yang tercatat dalam BEI periode 2015-2017. Hasil penelitian (Sari & Abundanti, 2016) menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum.

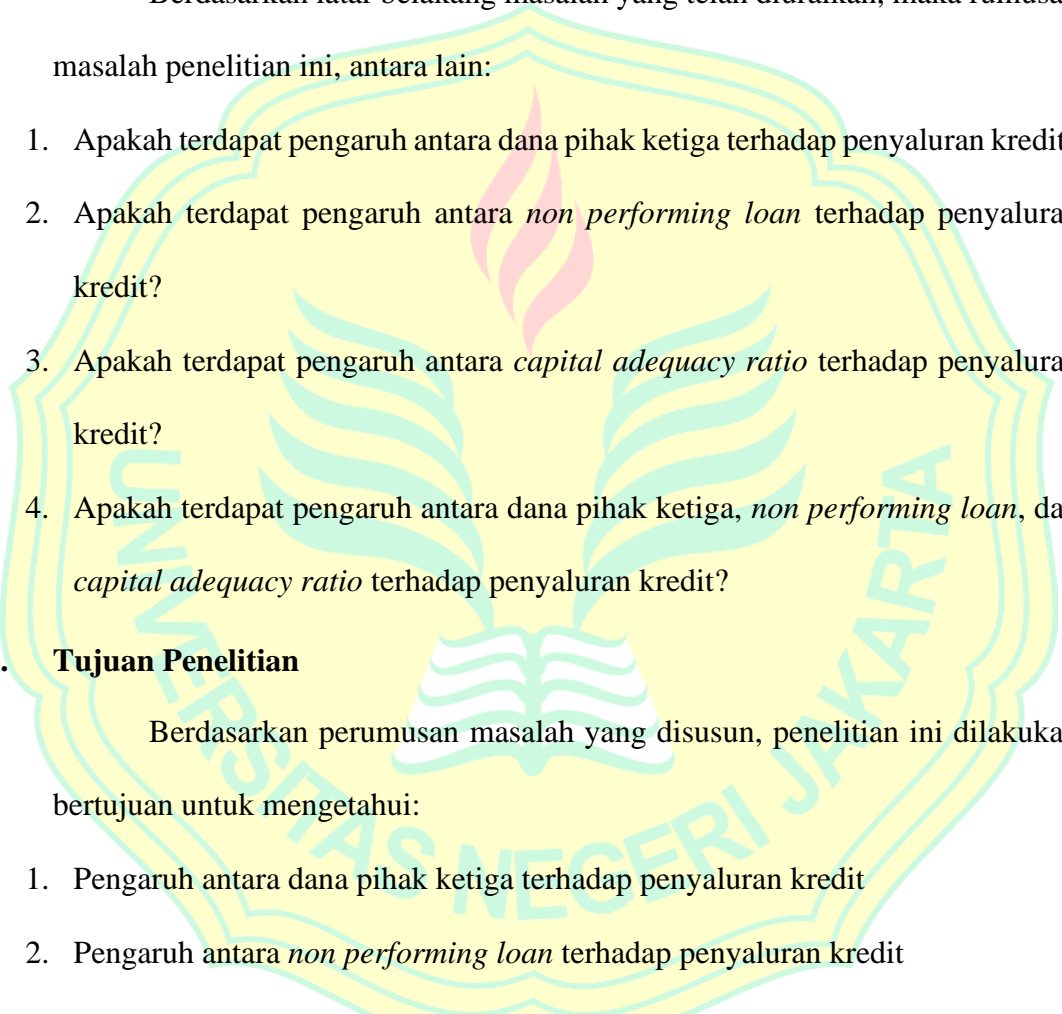
Penelitian (Sania & Wahyuni, 2016) menyebutkan bahwa dana pihak ketiga (DPK), *non performing loan* (NPL), dan *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh Bank Persero. Akan tetapi, penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh (Mukhlis, 2011), yang menyatakan bahwa tidak menemukan dana yang berasal dari pihak ketiga dalam kaitannya dengan penyaluran kredit bank BRI. Dalam hal ini pihak bank masih melihat insentif yang diberikan dalam kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tercermin masih lebih tinggi dibanding penyaluran kredit ke masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kekhawatiran bank pada kredit macet sebagai akibat dari krisis keuangan yang terjadi menyebabkan bank akan lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pemberian kredit.

Pada saat dana pihak ketiga bank bernilai tinggi, artinya bank memiliki sumber dana yang tinggi pula untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Sehingga, dari kegiatan bank tersebut diperoleh pendapatan dari bunga kredit

yang akan meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan bank (Haryoso & Kusdiasmo, 2016). Namun, penelitian berbeda ditunjukkan kembali oleh (Wau, 2019) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Risiko kredit terhadap total dana pihak ketiga yang tinggi menggambarkan kondisi bank berada dalam keadaan kurangnya kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (likuid).

Selain itu, penelitian (Rakhmadani, Masyhad, & Qomari, 2017) menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit. Hasil penelitian (Haryanto & Widyarti, 2017) menyebutkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit. Salah satu indikator kesehatan bank bisa dengan melihat rasio kecukupan modalnya. Jika nilai rata-rata CAR perbankan masih di atas ketentuan minimal modal sebesar 8%, maka kecil kemungkinan dampaknya pada penyaluran kredit. Hal tersebut dikarenakan bank telah lebih dari cukup untuk menumpas *shock*, khususnya dalam penyaluran kredit sehingga ketersediaan dana dapat dialihkan ke berbagai macam kegiatan lain atau diversifikasi.

Dilihat dari uraian beberapa penelitian terdahulu, terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga menimbulkan *gap research*. Maka, berdasarkan uraian masalah dan *gap research* tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan*,

dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Tahun 2017-2019)”.


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini, antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *non performing loan* terhadap penyaluran kredit?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *capital adequacy ratio* terhadap penyaluran kredit?
4. Apakah terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga, *non performing loan*, dan *capital adequacy ratio* terhadap penyaluran kredit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang disusun, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit
2. Pengaruh antara *non performing loan* terhadap penyaluran kredit
3. Pengaruh antara *capital adequacy ratio* terhadap penyaluran kredit
4. Pengaruh antara dana pihak ketiga, *non performing loan*, dan *capital adequacy ratio* terhadap penyaluran kredit

D. Kebaruan Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan studi pada Bank Umum Swasta Nasional tahun 2017-2019, sehingga penelitian ini tidak hanya terfokus pada satu perusahaan perbankan tertentu, melainkan mencakup beberapa perusahaan perbankan yang dikelompokkan menjadi kelompok bank BUSN. Penelitian ini menggunakan data BUSN, karena bank umum diketahui memiliki kegiatan operasional yang lebih luas dibanding Bank Perkreditan Rakyat.

